

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI DESA PAGERHARJO KABUPATEN KULON PROGO

THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL-BASED EDUCATION POLICY IN PAGERHARJO KABUPATEN KULON PROGO

Oleh:

Susilawati, Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, FIP, UNY,
shuse555@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala desa, kepala dusun, ketua seni budaya, ketua karang taruna, dan peserta kegiatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo, belum dimanajemen secara terperinci seperti pelaksanaannya, keuangan, sarana prasarana dan prosedur kerja. Implementasi kebijakan baru himbuan pemerintah desa kemudian diaplikasikan langsung oleh masyarakat. pengaplikasiannya melalui sosialisasi, pemberian contoh, pembiasaan, kegiatan sosial budaya. Pelaksanaan program meliputi: a) komunikasi melalui sosialisasi dan koordinasi perangkat desa, dusun dan organisasi masyarakat; b) sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana tersedia; c) disposisi atau respon masyarakat positif; d) struktur birokrasi ada dan terlibat dalam program kegiatan. 2) faktor pendukung: tujuan bersama, adanya pemahaman pendidikan berbasis budaya, ada program kegiatan penunjang, organisasi masyarakat, partisipasi dan sarana prasarana. Faktor penghambat: partisipasi musiman, orientasi pada keuntungan, belum ada pedoman pelaksanaan, serta pengaruh negatif arus global dan kemajuan teknologi.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, pendidikan berbasis budaya, desa budaya.*

Abstract

The purpose of the research is to describe the implementation of education policy basis the culture of Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. The type of the research is descriptive qualitative. The subject of the research are village headman, cluster headman, the head of culture and art, the head of Karang Taruna and the participants. Data collection techniques are observation, interview and documents study. Data analysis consist of data reduction, data presentation and summary. The data validity test uses the source triangulation and technique of triangulation. The result of this research shows that 1) the education policy implementation based in Pagerharjo village far is not managed in detail and either related to implementer, finance, working procedure, new policy implementation obligor by the the distric government and independent applied directly by community. The application it self is taken through socialization process, given example and habit, applied through social culture activities. The realization of program they are a) the communication which is built through socialization; b) the source of human, fund, means and infrastructure are available; c) authorizing signature related to the positive response; d) structure bureaucracy especially in community organization is involved of the program activity, 2) proponent factors include: the clear purpose, community comprehension of culture education; proponent activity program; facilitated of community organization and culture; enough of means and infrastructure. The barriers factors are; interest participation is low, mindset and community material orientation, no compass of culture education realization and also the negative influence of globalization and technology development.

Keywords: policy implementation, cultural-based education, cultural village

PENDAHULUAN

Pendidikan seharusnya menjadi sarana utama dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, dimana pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terkait dan saling mengisi. Sebagaimana diungkapkan oleh Tilaar (2002:70) bahwa kebudayaan merupakan dasar dari praksis pendidikan maka bukan saja seluruh proses pendidikan berjiwakan kebudayaan nasional, akan tetapi juga seluruh unsur kebudayaan harus diperkenalkan dalam proses pendidikan. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa, apapun bentuk pendidikan yang dilaksanakan haruslah berpegang pada kebudayaan, sehingga proses pendidikan tidak sekedar menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual saja namun juga cerdas secara kultural yaitu manusia berbudaya yang tidak meninggalkan jati diri bangsanya.

Bentuk pendidikan sendiri meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang keseluruhannya memiliki tugas penting untuk memberikan segala pengetahuan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan. Berbagai bentuk pendidikan yang tersedia pendidikan informal merupakan salah satu agen pendidikan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pengenalan dan penanaman nilai budaya, karena pemberian pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja,

kapan saja dan dimana saja tidak terbatas ruang dan waktu.

Cara yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur budaya adalah dengan memaksimalkan keberadaan kelompok masyarakat yang ada dan meningkatkan partisipasi anggota masyarakat di dalamnya. Bentuk kegiatan dapat berupa pembiasaan dalam keseharian untuk bertutur kata sopan dan santun, saling menghargai pada sesama, budaya bersih, dan nilai-nilai lain yang dapat diajarkan, serta mendorong untuk ikut serta dalam kegiatan desa seperti bersih desa, karawitan, tari, pedalangan, ketoprak, upacara adat, dan seni kebudayaan lain yang terdapat di daerah setempat.

Melihat realita masyarakat Indonesia dengan berbagai suku, ras, agama dan berbagai latar belakang sejarah, telah menghasilkan berbagai bentuk simbol kebudayaan yang di dalamnya memuat berbagai unsur nilai, norma, moral, etika estetika, serta adat istiadat setempat yang menjadi pedoman masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku. Namun, dengan seiring perkembangan zaman di abad ke-21 ini unsur-unsur kebudayaan tersebut mulai luntur dan perlahan ditinggalkan oleh masyarakat seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap krisis karakter dan degradasi moral bangsa. Perkembangan media informasi dan

komunikasi secara tidak langsung telah mempertontonkan dan memperkenalkan budaya kekerasan, pornografi, dan tontonan tidak mendidik lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, seperti *dance korea*, *power rangers*, *lagu hiphop* yang banyak dihafal oleh usia anak-anak, selain itu maraknya perkelahian dan tawuran merupakan salah satu akibat dari gagalnya fungsi keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak dan sekaligus menjadi kontrol sosial pendidikan, dimana generasi muda telah kehilangan pedoman tingkah laku dan sosok pendidik (orang dewasa) yang mampu menjadi contoh teladan dalam bertingkah laku.

Berdasarkan pemaparan Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti pada Harian Terbit dikutip dalam berita KPAI 14 Juni 2015 menunjukkan bahwa 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta *pornografi* dan *cybercrime* 1032 kasus. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6% di lingkungan sekolah dan 17.9% di lingkungan masyarakat, 78.3% anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah

menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan pada anak lain dan menirunya (Sumber:<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>).

Berdasarkan realita masyarakat dengan berbagai permasalahan moral dan krisis karakter yang setiap saat semakin meningkat, maka dibutuhkan sebuah kebijakan maupun program yang mampu menekan angka kekerasan dan bentuk-bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur budaya, selain itu juga mampu menjaga, melestarikan dan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi agar unsur asli kebudayaan bangsa Indonesia tidak hilang.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ialah dengan diputuskannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, dengan begitu pendidikan yang dilaksanakan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya yang ada khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini telah gencar dilaksanakan diberbagai lembaga pendidikan formal atau sekolah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekolah yang mengalami banyak kendala diantaranya, masalah guru yang belum mampu mengimplementasikan dalam

kegiatan pembelajaran di sekolah serta kendala lainnya berupa sarana dan prasarana belum mendukung. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana Ari Pudyastuti, tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SD Negeri Mendiro, Kulon Progo.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pendidikan budaya yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat (informal) dengan *background* sebagai desa budaya, sehingga peneliti mengambil fokus penelitian terkait Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo.

Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pendidikan budaya, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan

implementasi kebijakan pendidikan budaya, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo.

Adapun teori terkait penelitian ini yaitu: kebijakan pendidikan disampaikan oleh Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140) bahwa merupakan keseluruhan proses dan

hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan di Kamus Webster dalam Sholichin Abdul Wahab, (2014:134) merumuskan “istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Selanjutnya teori Edward III dalam Joko Widodo (2008:96-106) bahwa teori ini mengajukan 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain variabel *communication, resources, dispositions*, dan *bureaucratic structur*.

Teori kebudayaan disampaikan Koentjaraningrat (2009:144) bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan identitas diri manusia yang diperoleh melalui pembiasaan dan proses belajar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. Penelitian dilakukan pada Januari hingga Maret 2017.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, kepala dusun, ketua seni budaya, karang taruna dan peserta kegiatan.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

a. Tahap Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan di Desa Pagerharjo baru sampai pada himbuan dan penyusunan program kegiatan sehingga

belum sampai dibuat kebijakan operasional seperti peraturan desa yang khusus mengatur pengelolaan pendidikan berbasis budaya secara jelas. Penjabaran kebijakan pendidikan berbasis budaya baru wujudkan melalui program desa seperti JBM (jam belajar masyarakat), pelestarian lingkungan dan budaya yang setelah itu di sosialisasikan dan himbuan kepada masyarakat agar turut merealisasikan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada guna mensukseskan program tersebut.

b. Tahap Pengorganisasian

Pengorganisasian implementasi kebijakan belum tersusun secara terstruktur dan rinci oleh pihak desa, akan tetapi pengorganisasian dilimpahkan penuh kepada komponen masyarakat dengan membentuk kepengurusan serta pelibatan organisasi masyarakat untuk mengelola program kegiatan. Sejauh ini Pemerintah desa sekedar memberikan sosialisasi dan himbuan kepada komponen masyarakat untuk dilaksanakan.

Selama ini program-program desa dimanajemen atau dikelola langsung oleh masyarakat baik pelaksana program, system pelaksanaan, sumber daya dan peralatan termasuk penjadwalan program, dengan begitu pendekatan pengorganisasian cenderung secara kultural oleh komponen masyarakat bukan secara struktural yang menunggu diatur dari pemerintah desa.

c. Tahap Aplikasi

1) Komunikasi

Faktor komunikasi perlu diperhatikan guna memberikan informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan, selain itu dengan komunikasi yang dibangun dengan baik mampu memberikan dorongan pada para pelaku kebijakan agar dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya yang dilaksanakan di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo dilihat dari aspek komunikasinya, baik dengan aparat pemerintah maupun masyarakat umum telah dilakukan dengan berbagai cara, tujuannya agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan jelas kepada organisasi dan kelompok sasaran seperti, program-program yang telah direncanakan guna mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya. Program tersebut disampaikan melalui sosialisasi dan koordinasi saat pertemuan dengan perangkat desa dan dusun dengan melibatkan kelompok organisasi yang ada di masyarakat, lalu melalui even atau kegiatan dengan memberi dorongan dan motivasi

yang disampaikan secara luwes, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan dalam segala bidang bagi masyarakat sekitar agar dapat berpartisipasi secara aktif diberbagai program kegiatan khususnya sosial budaya.

2) Sumber daya

Sebagaimana halnya dengan desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya dengan berbagai program juga memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia yang mencakup seluruh komponen desa mulai dari pemerintah desa, kepala dusun, pengurus organisasi masyarakat terlebih organisasi seni budaya, pendamping desa budaya, karang taruna (pemuda), serta masyarakat umum mulai dari anak-anak sampai orang tua untuk dilibatkan. Pengembangan sumber daya manusia juga didukung dengan tokoh masyarakat yang pandai dibidang seni budaya termasuk mengundang narasumber guna diberikan pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan program sendiri tidak lepas dari ketersediaan pendanaan yang diperoleh dari swadaya masyarakat serta dana hibah pemerintah seperti Danais dan APBDes dengan pengusulan proposal. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di desa Pagerharjo terbilang mendukung dan mampu menunjang pendidikan berbasis budaya, seperti tersedianya beberapa set gamelan atas nama desa dan milik pedusunan, alat

musik rebana, angklung, balai pertemuan, pendopo desa dan dusun, peralatan tari, busana tari, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu juga pemerintah provinsi dan kota telah memberikan kewenangan pada pemerintah desa dan pemuda untuk mengelola dan terus mengembangkan seni budaya dan adat tradisi yang ada termasuk wisata agar dapat meningkatkan ekowisata dan budaya di Kabupaten Kulon Progo.

3) Disposisi

Implementasi pendidikan berbasis budaya di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo terlihat memiliki respon positif serta mau mendukung dalam pelaksanaan program kegiatan, hal tersebut ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, selain itu bentuk dukungan yang berikan masyarakat dapat berupa moril maupun materiil. Pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya masih memiliki tantangan terkait disposisi masyarakat yaitu, masih terdapat beberapa tantangan bagi masyarakat bahwa masih terdapat beberapa dari anggota masyarakat yang masih belum tertarik untuk terlibat secara aktif atau masih musiman terlebih pada generasi muda.

4) Struktur birokrasi

Kondisi struktur birokrasi di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan program penunjang pendidikan berbasis budaya dilakukan melalui koordinasi baik dari pemerintah desa, kepala

dusun serta seluruh organisasi yang ada di masyarakat turut dilibatkan dalam program kegiatan pendidikan berbasis budaya, selain itu antar unit organisasi secara bersama-sama bertanggungjawab atas program yang telah dilimpahkan, keberadaan organisasi pelaksana selain sebagai wadah kegiatan bagi masyarakat juga berperan sebagai penggerak dan motivator bagi masyarakat, sehingga mampu merangkul anggota masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua dan masyarakat pada umumnya agar dapat terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Supaya hubungan antar birokrasi serta organisasi masyarakat dapat terjalin harmonis setiap ada even kegiatan baik dari pemerintah maupun organisasi masyarakat mereka selalu memberikan informasi serta undangan, terlepas dari itu juga diadakan sarasehan sebagai wahana diskusi bersama serta pemerintah telah memberikan kewenangan pada masyarakat terlebih para pemuda dalam mengolah dan mengembangkan potensi alam, seni budaya serta adat tradisi yang ada di lingkungannya khususnya desa Pagerharjo.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan latar belakangnya Desa Pagerharjo merupakan desa yang kental akan seni budaya dan adat tradisi dari dahulunya sebelum pemerintah meresmikannya sebagai desa budaya, selain itu masyarakat telah memiliki alasan dan tujuan yang jelas mengapa mereka tetap bertahan melaksanakan berbagai pendidikan seni budaya dan adat istiadat. Tujuannya secara umum yaitu, untuk melestarikan nilai seni budaya dan adat istiadat untuk terus dikenalkan dan diajarkan pada masyarakat terlebih pada generasi muda.

Kemudian pemahaman masyarakat akan pendidikan berbasis budaya sendiri juga mendukung pengimplementasian kebijakan pendidikan berbasis budaya yang diperoleh dari proses pengkomunikasian yang baik dengan begitu masyarakat dapat mengerti apa yang menjadi tujuan, isi dan cara yang ditempuh dalam melaksanakan pendidikan berbasis budaya, karena dengan mereka paham dan mengerti apa yang dimaksud pendidikan budaya sendiri tentunya mereka akan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai luhur budaya sehingga mau turut serta terlibat dalam berbagai program kegiatan.

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di Desa pagerharjo juga didukung dengan adanya Perda DIY nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya yang menjelaskan bahwa pelaksanaannya

dapat melalui jalur formal, nonformal, dan informal artinya pendidikan yang dilaksanakan di masyarakat termasuk pada penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal. Lalu penerapannya juga telah diatur dalam Pergub DIY nomor 68 tahun 2012 tentang pedoman penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya juga didukung dengan adanya berbagai program kegiatan yang diadakan, baik atas usulan pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat sendiri yang mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan segala potensi sumber daya yang ada serta mampu mengangkat kembali eksistensi seni budaya dan adat istiadat masyarakat setempat khususnya desa Pagerharjo. Berlangsungnya program kegiatan pendidikan berbasis budaya juga dukungan tokoh penggerak masyarakat diberbagai organisasi masyarakat seperti organisasi kesenian baik tari, musik, dan teater yang fokus pada pelestarian seni budaya dan adat tradisi. Selain itu juga organisasi Pokdarwis yang fokus pada pelestarian alam, serta partisipasi masyarakat baik dukungan moril, tenaga serta swadaya guna membantu mensukseskan segala bentuk program kegiatan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo.

Tersedianya sarana dan prasarana baik yang berada di wilayah pedusunan maupun desa juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan pendidikan berbasis budaya, seperti adanya pendopo, balai pertemuan, balai serba guna, properti tari dan pewayangan serta perangkat gamelan dan alat musik pendukung lainnya untuk latihan tari, karawitan dan rebana, dengan peralatan yang tersedia beserta lahan yang telah dibangun telah memberikan kesempatan pada masyarakat sekitar untuk belajar berbagai banyak hal baik kesenian, ketarampilan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh melalui kegiatan sosial lainnya.

Kemudian penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya juga didukung dengan diputuskannya SK Gubernur DIY yang telah meresmikan desa Pagerharjo sebagai desa budaya. Pelantikan pengurus desa budaya diresmikan oleh Bupati Kulon Progo yang dihadiri oleh kepala Dinas Kebudayaan Pemda DIY mampu membarikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan budaya terlebih pada anak-anak dan generasi muda. Dengan begitu harapannya desa Pagerharjo dapat menjadi contoh sebagai desa yang mampu menciptakan lingkungan dan warga masyarakat yang selalu menjunjung tinggi seni budaya dan

adat istiadat agar tetap lestari. Selain itu juga disertai adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pada desa dalam mengelola dan mengembangkan segala potensi baik seni budaya, adat, dan alam.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

Implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya yang dilaksanakan dalam berbagai program kegiatan selain didukung dengan berbagai faktor yang ada seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ternyata masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dilapangan diantaranya, dalam proses pelaksanaan program masih belum memiliki pedoman sebagai acuan yang jelas guna menuntun proses program kegiatan serta kondisi masyarakat terlebih pemuda yang minatnya masih musiman.

Hambatan pertama terkait belum adanya pedoman maupun landasan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya berguna untuk mengarahkan proses kegiatan agar apa yang menjadi tujuan dan target pencapaian yang diinginkan dapat terlaksana dengan maksimal dan bertahap masih belum ada. Mengingat pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang dilaksanakan di masyarakat akan jauh berbeda dengan lembaga pendidikan

formal maupun tempat kursus yang telah memiliki pedoman kurikulum baku. Dengan memiliki pedoman yang jelas, maka pelaksanaan program kegiatan dapat direncanakan secara jelas tujuan, isi, media, cara, serta sistem evaluasi yang digunakan.

Faktor penghambat lain yaitu, minat masyarakat secara umum masih musim-musiman terlebih pada anak-anak dan pemuda yang telah terpengaruh dengan budaya barat seiring perkembangan teknologi informasi. Pengaruh arus global dengan perkembangan teknologi informasi yang kemungkinan besar mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat (mengadopsi budaya baru yang cenderung kearah negatifnya) serta rawan penyalahgunaan. Latar belakang pendidikan dan ekonomi membuat beberapa pola pikir masyarakat yang berbeda-beda seperti, pendidikan budaya dianggap kuno tidak paraktis, melihat dari segi keuntungan yang diperoleh jika terlibat atau berorientasi pada materi, serta komitmen yang masih kurang

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan mengenai kultur sekolah di SMA Negeri 1 Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

Implementasi pendidikan berbasis budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dahulu, namun baru tahun 2015 ini dengan diresmikannya sebagai desa budaya. Pelaksanaan kebijakan diintegrasikan dalam berbagai program kegiatan, sebagaimana telah diatur dalam PERDA DIY Nomor 5 Tahun 2011 serta tertuang dalam Pergub DIY Nomor 68 Tahun 2012.

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di Desa Pagerharjo tergolong kebijakan yang bersifat *bottom-up* atau sudah terlaksana sebelum pemerintah mencetuskan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat dapat dikatakan lebih siap mendukung dan melaksanakan kebijakan pendidikan budaya. Berbagai program yang ada dikomunikasikan melalui sosialisasi dan koordinasi saat pertemuan dengan perangkat desa dan dusun dengan melibatkan kelompok organisasi yang ada di masyarakat. Ketersediaan sumber daya sudah ada, seperti sumber daya manusia yang sudah turut berperan serta baik sebagai promotor, motivator, dan pelaksana, lalu ketersediaan sumber dana dari swadaya masyarakat dan hibah pemerintah Danais dan APBDes, serta tersedia sarana dan prasarana yang sudah mencukupi. Respon dan komitmen masyarakat positif, namun terdapat beberapa anggota masyarakat yang masih musiman untuk terlibat. Struktur

organisasi yang ada di masyarakat turut dilibatkan dan bertanggungjawab dalam program kegiatan pendidikan berbasis budaya.

Program pendidikan berbasis budaya di Desa Pagerharjo diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan sosial, seni budaya dan upacara adat seperti. Berbagai kegiatan tersebut mengenalkan berbagai nilai seperti, gotong-royong, sopan santun, kepedulian, patriotisme, religius, kreativitas, kebersihan, toleransi, cinta budaya, cinta produk lokal dengan semboyan Bela Beli Kulon Progo dan lain sebagainya. Karya yang dihasilkan dari proses pendidikan budaya yang sifatnya pelatihan berupa, seni lukis, ukir, topeng, kuda lumping dan aksesoris berbahan kayu.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

a. Faktor pendukung implemetasi kebijakan pendidikan budaya diantaranya yaitu 1) Masyarakat memiliki tujuan bersama yang jelas; 2) Adanya pemahaman masyarakat tentang pendidikan budaya; 3) Terdapat berbagai program kegiatan penunjang; 4) terdapat organisasi masyarakat sosial dan seni budaya yang memfasilitasi; 5) partisipasi masyarakat baik moril maupun materiil; 6) ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi; 7) Pelimpahan wewenang dari pemerintah dalam

pengelolaan dan pengembangan potensi desa; 8) Diputuskannya SK Gubernur sehingga secara resmi menyatakan desa Pagerharjo sebagai desa budaya.

b. Faktor penghambat implemetasi kebijakan pendidikan budaya diantaranya yaitu 1) Minat berpartisipasi dalam kegiatan masih musiman; 2) Pola pikir masyarakat serta orientasi mulai terarah pada materi dan keuntungan; 3) Belum memiliki pedoman atau landasan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang jelas; 4) Pengaruh arus global dengan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka peneliti menganjurkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan partisipasi anak-anak dan pemuda melalui kegiatan yang lebih menarik.
2. Sosialisasi kembali terkait program kebijakan pendidikan budaya.
3. Menyusun pedoman atau landasan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya dalam pendidikan nonformal dan informal.
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pendidikan berbasis budaya kaitanya dengan pendidikan agama dan pendidikan dalam keluarga, melihat keterkaitan pendidikan budaya dengan

kemajuan wisata, serta keterkaitan pendidikan budaya dengan taraf hidup masyarakat.

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Kosep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Cetakan kedua. Malang: Bayumedia Publising.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pudyastuti, S.A. (2016). *Skripsi: Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya di SD Negeri Mendirol Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: FIP UNY.

Setyawan, D. (2015). *Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat> pada hari 2 November 2016. Jam 12.56.

SMP Negeri 10 Yogyakarta. (2014). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Diakses dari <https://smpn10yk.files.wordpress.com/2014/03/pergub-no-68-tahun-2012-tentang-pedoman-penerapan-nilai-nilai-luhur-budaya-dalam-pengelolaan-dan-penyelenggaraan-pendidikan.pdf> pada hari Selasa, 1 November 2016. Jam 13.23 WIB.

Tilaar, H.A.R. & Nugroho R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, S.A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.